



Article Informations  
Corresponding Email:  
zidanzarco77@gmail.com

Received: 29/07/2025; Accepted:  
25/09/2025; Published: 15/10/2025

## **KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM KERJA SAMA KEAMANAN MARITIM TERHADAP INDONESIA MELALUI TREATY ON DEFENCE COOPERATION (TDC) TAHUN 2024**

**Muhammad Zidan Maulana**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Pada tahun 2024, Australia dan Indonesia berhasil memperbaharui kerja sama keamanan maritim melalui *Treaty on Defence Cooperation* (TDC). Kerja sama ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Australia untuk memperkuat keamanannya di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dengan Indonesia sebagai mitra strategis. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kepentingan Australia dalam menjalin kerja sama keamanan maritim dengan Indonesia melalui TDC tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepentingan Australia, seperti faktor *Core Values*, *Middle-Range Objectives*, dan *Long-Range Goals*. Namun, penelitian ini menemukan bahwa faktor *Core Values* memiliki pengaruh yang paling dominan dibandingkan faktor lainnya.

**Kata Kunci:** Kepentingan Nasional Australia, Kerja Sama Keamanan Maritim, *Treaty on Defence Cooperation* (TDC).

### **Abstract**

*In 2024, Australia and Indonesia successfully renewed their maritime security cooperation through the Treaty on Defence Cooperation (TDC). This cooperation is part of Australia's foreign policy to strengthen its security in the Indo-Pacific region, particularly with Indonesia as a strategic partner. This thesis aims to analyze and explain Australia's interests in establishing maritime security cooperation with Indonesia through the TDC in 2024. The research method used is qualitative research, with data collected through literature studies. The findings of this study indicate that several factors influence Australia's interests, including Core Values, Middle-Range Objectives, and Long-Range Goals. However, this research finds that the Core Values factor has the most dominant influence compared to the other factors.*

**Keywords:** Australia's National Interest, Maritime Security Cooperation, *Treaty on Defence Cooperation* (TDC).

## 1. PENDAHULUAN

Dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, kebangkitan Tiongkok menjadi awal masalah yang memengaruhi kepentingan nasional Australia. Tiongkok saat ini memiliki armada penangkap ikan jarak jauh terbesar di dunia dengan sekitar 4.600 kapal yang kerap beroperasi di wilayah sengketa seperti Laut Tiongkok Selatan, sehingga memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia<sup>1</sup>. Australia memandang ekspansi maritim dan pembangunan basis militer Tiongkok di Kepulauan Spratly dan Paracel sebagai ancaman langsung bagi kepentingan nasionalnya, terutama dalam menjaga jalur pelayaran bebas, stabilitas kawasan, dan keamanan maritim yang vital bagi perdagangan dan pasokan energi Australia<sup>2</sup>.

Sementara itu, Indonesia tetap menjalin hubungan ekonomi erat dengan Tiongkok, yang pada tahun 2023 tercatat sebagai mitra dagang terbesar dengan total nilai perdagangan mencapai 127 miliar USD<sup>3</sup>. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Australia karena penguatan hubungan Indonesia-Tiongkok berpotensi memperluas pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara, yang oleh Australia dipersepsikan sebagai *red flag* terhadap kepentingan nasionalnya di bidang pertahanan dan keamanan kawasan.

Dinamika hubungan internasional yang terus berkembang di kawasan Indo-Pasifik seperti kebangkitan Tiongkok telah membawa dampak besar pada tatanan global, terutama dalam hubungan internasional, geopolitik Asia, dan keamanan maritim. Membuat isu seperti keamanan maritim menjadi menarik untuk dipahami mengingat ancaman yang ditimbulkan semakin dinamis. Hal ini tercermin dalam konteks hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia terkait keamanan laut, kolaborasi tersebut diatur oleh *Treaty on Defence Cooperation* (TDC), yang menjadi landasan resmi bagi

---

<sup>1</sup> Indo-Pacific Defense Forum. "Australia, Indonesia Sign Defense Accord to Bolster Free and Open Indo-Pacific." Indo-Pacific Defense Forum, 2024, <https://ipdefenseforum.com/2024/09/australia-indonesia-sign-defense-accord-to-bolster-free-and-open-indo-pacific/>.

<sup>2</sup> Staf FORUM. "Kabar Terbaru Strategi Indo-Pasifik." Indo-Pacific Defense Forum, Mei 2024, <https://ipdefenseforum.com/id/2024/05/kabar-terbaru-strategi-indo-pasifik/>.

<sup>3</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia-Tiongkok 2023." kemendag.go.id, diakses 2025, <https://www.kemendag.go.id>.

kedua negara untuk memperdalam kerja sama demi menjaga stabilitas kawasan. Tahun 2024 menjadi momen penting dalam hubungan ini, dengan adanya pembaruan dan peningkatan TDC mencerminkan dinamika strategis yang terus berkembang di kawasan Indo-Pasifik<sup>4</sup>.

Perjanjian baru yang ditandatangani pada bulan Agustus 2024, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, bersama Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani sebuah perjanjian pertahanan yang dianggap sebagai tonggak terbesar dan terpenting dalam perjalanan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia<sup>5</sup>.

*Defence Cooperation Agreement* (DCA) ini memungkinkan peningkatan kerja sama praktis dan interoperabilitas antara Angkatan Pertahanan Australia dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam bidang keamanan maritim, latihan bersama, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan, logistik, pendidikan, dan kolaborasi industri pertahanan. Perjanjian ini memungkinkan militer kedua negara untuk beroperasi dari wilayah masing-masing dalam rangka kegiatan kerja sama yang telah disepakati bersama, sehingga semakin memperdalam kemitraan pertahanan dan mendukung tatanan kawasan yang berbasis pada aturan hukum.

Pemerintah Australia dan Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bukanlah sebuah aliansi militer, melainkan sebuah landasan kolaborasi guna memperkuat hubungan pertahanan kedua negara, sambil menjaga prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang mandiri dan aktif, serta mendukung terciptanya kestabilan dan kedamaian di kawasan regional.

*Defence Cooperation Agreement* (DCA) ini juga melengkapi berbagai kesepakatan sebelumnya, seperti *Lombok Treaty* (2006) dan *Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership* (2018), yang menegaskan kedalaman kepercayaan strategis dan rasa saling menghormati antara

---

<sup>4</sup> Staf FORUM, "Kabar Terbaru Strategi Indo-Pasifik," *Indo-Pacific Defense FORUM*, 2024, <https://ipdefenseforum.com/id/2024/05/kabar-terbaru-strategi-indo-pasifik/>.

<sup>5</sup> Australian Government Defence, "Australia-Indonesia Defence Cooperation Agreement Signed," 2024, <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2024-08-29/australia-indonesia-defence-cooperation-agreement-signed>.

Australia dan Indonesia<sup>6</sup>. Peningkatan perjanjian pada tahun 2024 mereka menegaskan tekad bersama untuk mendorong terciptanya perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di tengah eskalasi masalah keamanan dan konflik wilayah laut yang semakin kompleks di area tersebut<sup>7</sup>.

Meningkatnya persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin mengintensifkan kehadiran militer mereka di wilayah Indo-Pasifik, berkompetisi ketat dalam memperluas pengaruh lewat pembangunan aliansi strategis dan pembaruan teknologi pertahanan<sup>8</sup>. Sementara Amerika Serikat mempertahankan kemitraan tradisionalnya, klaim maritim Tiongkok yang semakin meluas dan armada penangkapan ikan jarak jauhnya yang terbesar di dunia dengan 4.600 kapal telah meningkatkan kekhawatiran di kawasan<sup>9</sup>. Dengan latar belakang tersebut, *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Australia dan Indonesia tahun 2024 berperan sebagai mekanisme penstabil, yang memungkinkan patroli maritim bersama dan latihan interoperabilitas tanpa menjadikan Indonesia berpihak pada blok manapun. Hal ini mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang mandiri dan proaktif, yang menjaga keseimbangan antara kekuatan global sekaligus memperkuat kemitraan dengan negara-negara berpengaruh menengah seperti Australia<sup>10</sup>.

Kemitraan ini memprioritaskan penanggulangan aktivitas penangkapan ikan yang melanggar aturan, perampokan laut, dan penyelundupan menjadi ancaman serius yang mengganggu keamanan dan kestabilan wilayah. Inisiatif Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*/GMF) dari Indonesia dan dukungan Australia terhadap *Port State*

---

<sup>6</sup> Mirage News, "Australia-Indonesia Defence Cooperation Joint Statement," 2024, <https://www.miragenews.com/australia-indonesia-defence-cooperation-joint-1299011/>.

<sup>7</sup> Indo-Pacific Defense FORUM, "Australia, Indonesia Sign Defense Accord to Bolster Free and Open Indo-Pacific," 2024, <https://ipdefenseforum.com/2024/09/australia-indonesia-sign-defense-accord-to-bolster-free-and-open-indo-pacific/>.

<sup>8</sup> Syed Ali Abbas, Amna Saqib, and Maryyum Masood, "US Military Posture in the Asia-Pacific and Its Impact on Regional Stability," *BTTN Journal* 3, no. 1 (2024): 66–88, <https://doi.org/10.61732/bj.v3i1.88>.

<sup>9</sup> Indo-Pacific Defense FORUM, "Illegal Catch," 2025, <https://ipdefenseforum.com/2025/04/illegal-catch/>.

<sup>10</sup> Benedicta Nathania and Aisha Kusumasomantri, "Indonesia Steps up Defence Relationships, but Stays Non-Aligned," 2025, <https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-steps-up-defence-relationships-but-stays-non-aligned/>.

*Measures Agreement* (PSMA) menyediakan kerangka kerja untuk menangani isu-isu tersebut<sup>11</sup>. Patroli bersama di bawah kerangka DCA meningkatkan kemampuan pengawasan di area zona ekonomi eksklusif Indonesia, kegiatan penangkapan ikan ilegal diperkirakan menimbulkan kerugian hingga sekitar 4 miliar dolar AS per tahun. Meskipun sudah ada upaya penanggulangan, tantangan masih berat karena Tiongkok tidak bergabung dalam PSMA dan armada ikan yang didukung negaranya terus menghambat efektivitas kerja sama regional<sup>12</sup>.

Ketentuan dalam DCA mengenai penggunaan basis militer bersama dan transfer teknologi termasuk keahlian Australia dalam sistem tempur laut dapat memperkuat persepsi tersebut. Namun, perjanjian ini menekankan prinsip timbal balik, di mana Indonesia memperoleh akses terhadap pelatihan tingkat lanjut dan pengembangan bersama aset-aset seperti pesawat amfibi N-219<sup>13</sup>. Yang paling penting, DCA tidak mencakup klausul berbagi intelijen atau pertahanan kolektif, sejalan dengan sikap non-blok Indonesia.

Meskipun dokumen publik DCA menguraikan area kerja sama yang luas (keamanan maritim, tanggap bencana, kolaborasi industri pertahanan), rincian operasionalnya tetap bersifat rahasia<sup>14</sup>. Kurangnya keterbukaan ini telah memicu spekulasi mengenai posisi strategis Australia, khususnya terkait akses ke pangkalan-pangkalan Indonesia yang berada di dekat titik-titik krusial seperti Selat Lombok. Namun, status perjanjian ini memastikan adanya pengawasan parlementer di kedua negara, dan kesesuaiannya dengan *Lombok Treaty* (2006) memberikan kesinambungan terhadap mekanisme transparansi yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>11</sup> Arcelinocent Emile Pangemanan, Anak Agung Banyu Perwita, and Sudibyo Sudibyo, "Indonesia–Australia Maritime Cooperation and Its Implication on Indonesia’S Maritime Security and Sovereignty," *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 8, no. 3 (2022): 401, <https://doi.org/10.33172/jp.v8i3.1870>.

<sup>12</sup> Indo-Pacific Defense FORUM, "Illegal Catch," 2025, <https://ipdefenseforum.com/2025/04/illegal-catch/>.

<sup>13</sup> Edna C. Pattisina, "Indonesia and Australia: Defence Cooperation under Prabowo," 2025, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-australia-defence-cooperation-under-prabowo>.

<sup>14</sup> Australian Government Defence, "Australia-Indonesia Defence Cooperation Agreement Signed," 2024, <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2024-08-29/australia-indonesia-defence-cooperation-agreement-signed>.

Kemitraan ini menunjukkan respons pragmatis terhadap tantangan keamanan bersama, meskipun keberhasilan jangka panjangnya bergantung pada keseimbangan antara pembangunan kapasitas dengan otonomi strategis Indonesia. Saat kedua negara menghadapi persaingan Amerika Serikat-Tiongkok, fokus DCA pada ancaman non-tradisional menawarkan model kerja sama negara-negara menengah di kawasan yang diperebutkan.

Dampak umum dari kerja sama keamanan ini mempengaruhi stabilitas keamanan laut antara Australia dan Indonesia memegang posisi vital dalam memperkuat stabilitas dan keselamatan di wilayah Asia Tenggara serta seantero kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara memiliki kepentingan strategis bersama dalam menjaga jalur pelayaran yang aman dan terjamin, yang sangat penting bagi perdagangan internasional dan pasokan energi. Penguatan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia turut berkontribusi dalam mencegah ancaman maritim lintas negara seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal, sehingga mendorong terciptanya lingkungan keamanan yang lebih stabil di kawasan<sup>15</sup>. Kolaborasi bilateral ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas dalam rangka memelihara kedamaian dan kestabilan di Asia Tenggara, prioritas utama ASEAN dan berbagai mekanisme regional, upaya ini dirancang untuk menahan dominasi kekuatan besar di wilayah Indo-Pasifik<sup>16</sup>.

Maka dari itu, secara idealnya kerja sama keamanan maritim antara Australia dan Indonesia melalui *Treaty on Defence Cooperation* (TDC) yang diperbarui menjadi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) pada tahun 2024, seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik, memperdalam kemitraan bilateral, dan menangani ancaman maritim lintas negara secara kolektif. Dalam kerangka ini, Australia diharapkan menjalin hubungan yang setara dan saling menguntungkan dengan Indonesia, tanpa menimbulkan persepsi dominasi atau pengaruh politik yang berlebihan. Namun secara fakta dengan dinamika geopolitik

---

<sup>15</sup> R.A Supriyanto, "Enhancing Australia Indonesia Maritime Security Cooperation," Aspi, no. November 2014 (2014), <http://www.aspistrategist.org.au/jokowis-waves-of-opportunity/>.

<sup>16</sup> Sutanto, Rudy & Priyanto, Priyanto. (2023). The Roles Of Asean In Building A Strategic Equilibrium With Major Powers To Strengthen Sustainable Stability, And Maritime Security In The Region. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. 9. 100-115. 10.33172/jdp.v9i3.14513.

kawasan yang dipicu oleh rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kepentingan nasional Australia untuk mempertahankan akses strategis ke jalur pelayaran vital dan memperluas pengaruhnya di kawasan, turut membentuk arah kerja sama ini. Melalui DCA, Australia tidak hanya memperkuat kapasitas militernya di kawasan tetapi juga mengamankan posisinya sebagai aktor utama dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik, termasuk dengan memperoleh akses operasional di wilayah Indonesia dan memperluas interoperabilitas militernya.

Australia memanfaatkan kerja sama pertahanan sebagai sarana untuk mencapai tujuan strategisnya, seperti menjaga keamanan nasional, memperkuat aliansi dan kemitraan regional, serta mencegah dominasi kekuatan lain di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, kerja sama keamanan maritim dengan Indonesia menjadi instrumen penting dalam strategi Australia untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan regional, termasuk meningkatnya persaingan geopolitik dan ancaman non-tradisional di laut. Analisis terhadap kepentingan nasional Australia dalam kerja sama tersebut sangat penting untuk memahami motivasi di balik kebijakan luar negerinya, khususnya dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Sehingga penelitian ini berjudul “Kepentingan nasional Australia dalam kerja sama keamanan maritim terhadap Indonesia melalui *Treaty on Defence Cooperation* (TDC).”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikembangkan oleh K.J. Holsti. Menurut Holsti, kepentingan nasional dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *core values*, *middle-range objectives*, dan *long-range goals*<sup>17</sup>. Klasifikasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai prioritas negara dalam kebijakan luar negeri secara lebih sistematis dan hierarki.

#### 1. *Core Values* (Nilai Inti)

*Core values* merupakan kepentingan paling mendasar dan tak dapat dinegosiasikan bagi suatu negara. Nilai-nilai inti ini mencakup kelangsungan

---

<sup>17</sup> Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis*. 7th ed., Prentice Hall, 1995.

hidup negara, integritas teritorial, kedaulatan, stabilitas politik dalam negeri, dan sistem ideologi nasional. Negara akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap ancaman yang mengganggu *core values* ini, termasuk intervensi militer jika diperlukan.

Holsti menekankan bahwa *core values* adalah fondasi dari semua bentuk kebijakan luar negeri dan menjadi patokan utama dalam menilai kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ini, misalnya, keterlibatan suatu negara dalam kerja sama pertahanan regional dapat dilihat sebagai langkah untuk melindungi nilai-nilai inti tersebut dari ancaman eksternal.

## 2. *Middle-Range Objectives* (Tujuan Jangka Menengah)

*Middle-range objectives* adalah kepentingan yang tidak sekrusial *core values* tetapi tetap penting bagi stabilitas dan kemakmuran negara. Kepentingan ini mencakup isu-isu seperti aliansi strategis, kerja sama ekonomi, akses terhadap pasar internasional, pengaruh politik di kawasan, serta kerja sama keamanan regional. Tujuan-tujuan ini bersifat strategis dan sering menjadi dasar diplomasi aktif maupun kerja sama bilateral dan multilateral.

Negara akan berupaya mengejar tujuan-tujuan ini selama tidak bertentangan dengan nilai inti. Dalam konteks kerja sama keamanan maritim, misalnya, *middle-range objectives* dapat mencakup upaya memperkuat pengaruh regional, membangun stabilitas kawasan, dan mengamankan jalur perdagangan internasional.

## 3. *Long-Range Goals* (Tujuan Jangka Panjang)

Tujuan jangka panjang lebih bersifat idealistik dan berorientasi pada masa depan. Kepentingan ini meliputi visi atau cita-cita besar suatu negara dalam tatanan internasional, seperti penyebaran nilai-nilai demokrasi, keadilan global, atau reformasi sistem internasional. Meskipun tidak mendesak secara langsung, tujuan jangka panjang tetap mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri dalam jangka panjang dan biasanya dipengaruhi oleh ideologi, sejarah, dan aspirasi nasional.

Kepentingan jangka panjang ini berfungsi sebagai arah kebijakan yang lebih luas dan dapat membentuk persepsi strategis negara terhadap peranannya di dunia. Holsti menyatakan bahwa tujuan jangka panjang kerap

menjadi dasar pembangunan identitas internasional suatu negara, misalnya sebagai pemimpin regional atau penjaga perdamaian global.

Dalam kerangka penelitian ini, teori kepentingan nasional Holsti digunakan untuk menganalisis motif dan tujuan Australia dalam menjalin kerja sama keamanan maritim dengan Indonesia melalui *Treaty on Defence Cooperation* (TDC) 2024. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi atas apakah kerja sama tersebut dilandasi oleh perlindungan nilai inti, pencapaian tujuan strategis kawasan, atau bagian dari ambisi jangka panjang Australia dalam sistem internasional. Melalui kerangka ini, analisis terhadap kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilakukan secara lebih struktural dan mendalam, serta menghindari generalisasi berlebihan mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan nasional”.

## **2. PEMBAHASAN**

### ***Core Values* Australia dalam kerja sama keamanan maritim terhadap Indonesia melalui *Treaty on Defence Cooperation* (TDC) tahun 2024**

*Core values* merupakan kepentingan paling mendasar dan tak dapat dinegosiasikan bagi suatu negara. Nilai-nilai inti ini mencakup kelangsungan hidup negara, integritas teritorial, kedaulatan, stabilitas politik dalam negeri, dan sistem ideologi nasional. Setiap negara memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi penuntun dalam menentukan sikap dan arah kebijakan luar negerinya, yang pada dasarnya berangkat dari perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut. Dimana negara memandang bahwa *core values* tidak hanya sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai syarat mutlak dalam mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika internasional. Negara akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap ancaman yang mengganggu *core values* ini, termasuk intervensi militer jika diperlukan<sup>18</sup>. Sikap ini mencerminkan betapa tingginya posisi nilai-nilai inti tersebut dalam hierarki kepentingan nasional, di mana pelanggaran terhadap nilai-nilai ini dianggap sebagai bentuk ancaman serius yang harus segera direspon.

Holsti menekankan bahwa *core values* adalah fondasi dari semua bentuk kebijakan luar negeri dan menjadi patokan utama dalam menilai

---

<sup>18</sup> Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis*. 7th ed., Prentice Hall, 1995.

kepentingan yang lebih luas. Dalam perspektif Holsti, negara tidak mungkin menyusun kebijakan luar negeri yang rasional dan konsisten tanpa merujuk pada nilai-nilai inti yang menjadi basis identitas nasional dan eksistensi negara itu sendiri. Kebijakan luar negeri yang tidak berpijak pada *core values* dapat menimbulkan inkonsistensi serta melemahkan posisi negara dalam sistem internasional.

*Core values* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik diplomasi dan strategi keamanan suatu negara. Dalam konteks ini, misalnya, keterlibatan suatu negara dalam kerja sama pertahanan regional dapat dilihat sebagai langkah untuk melindungi nilai-nilai inti tersebut dari ancaman eksternal. Kerja sama seperti itu bukan semata bentuk solidaritas internasional, tetapi juga merupakan manifestasi dari kepentingan nasional yang berakar pada kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan internal dari pengaruh luar yang dianggap mengancam.

Asumsi dalam penelitian ini yaitu tindakan Australia untuk dapat menghadapi ancaman keamanan dari Tiongkok sebagai *core values*. Australia dalam hal ini memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap peningkatan aktivitas militer dan diplomatik Tiongkok, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, yang dipandang dapat mengancam stabilitas kawasan serta secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada keamanan nasional Australia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa pada tanggal 26 Mei 2022, di mana pesawat jet tempur J-16 milik Tiongkok mencegat pesawat pengintai maritim RAAF P-8 milik Australia ketika melakukan patroli maritim rutin di wilayah udara internasional Laut Cina Selatan<sup>19</sup>. Insiden ini menjadi bukti konkret bagaimana aktivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya berdampak terhadap negara-negara yang terlibat langsung dalam sengketa teritorial, tetapi juga terhadap negara-negara lain seperti Australia yang memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kebebasan navigasi dan keamanan maritim di wilayah tersebut.

---

<sup>19</sup> Defence. "Chinese Interception of P-8A Poseidon on 26 May 2022." *News and Events*, Australian Government Department of Defence, 5 June 2022, <https://www.defence.gov.au/news-events/releases/2022-06-05/chinese-interception-p-8a-poseidon-26-may-2022>. Diakses 14 Juli 2025.

Peristiwa pencegahan tersebut bukanlah yang pertama, namun menjadi salah satu dari serangkaian insiden yang menggambarkan pola eskalasi tindakan militer Tiongkok di wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, Tiongkok kerap melakukan manuver yang dianggap berbahaya dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Insiden ini mempertegas kekhawatiran Australia bahwa aktivitas militer Tiongkok bukan hanya bentuk unjuk kekuatan, melainkan juga bagian dari strategi coercive diplomacy yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Selain itu pada 19 April 2024, Richard Marles sebagai wakil perdana Menteri sekaligus Menteri pertahanan Australia memberikan pernyataan bahwasannya:

*"China has employed coercive tactics in pursuit of its strategic objectives, including forceful handling of territorial disputes and unsafe intercepts of vessels and aircraft operating in international waters and airspace in accordance with international law"*<sup>20</sup>

Pernyataan ini memberikan legitimasi terhadap kekhawatiran Australia akan niat dan tindakan Tiongkok di kawasan. Dalam kerangka *core values*, tindakan Tiongkok tersebut dipandang tidak hanya sebagai ancaman terhadap norma hukum internasional, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Australia, terutama dalam hal stabilitas wilayah, hak atas kebebasan bernavigasi, serta integritas wilayah udara internasional yang menjadi jalur utama bagi aktivitas militer dan sipil Australia.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Australia merasa terancam atas Tiongkok. Menurut peneliti, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Tiongkok telah melakukan tindakan yang agresif dan berbahaya yang dapat mengancam Australia dengan melakukan pencegahan terhadap pesawat Australia. Sehingga menurut peneliti, hal tersebut merupakan bentuk bahwa Australia merasa sangat terancam atas perilaku atau tindakan

---

<sup>20</sup> "Chinese State Media Issues 'Extreme Danger' Warning to Key US Ally." *Newsweek*, 9 May 2024, <https://www.newsweek.com/chinese-state-media-south-china-sea-australia-united-states-ally-1892288>. Diakses 14 Juli 2025.

Tiongkok. Pengekspresian ancaman ini menjadi justifikasi bagi Australia untuk mengambil langkah-langkah strategis melalui kebijakan luar negeri, termasuk dengan memperkuat kerja sama pertahanan di kawasan.

Selain itu, peneliti melihat bahwa kerja sama *Treaty on Defence Cooperation* 2024 yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dilakukan untuk dapat menghadapi ancaman dari Tiongkok. Australia memandang bahwa Indonesia sebagai negara strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut dikarenakan Australia dan Indonesia memiliki pandangan yang sama terhadap Tiongkok, salah satunya adalah tentang konflik di Laut Cina Selatan, di mana Australia dan Indonesia menolak klaim Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Penolakan ini berakar dari komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang dijunjung tinggi dalam UNCLOS 1982, serta kesamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas dan keterbukaan jalur laut internasional yang vital bagi perdagangan dan keamanan regional.

Penolakan Australia tersebut dapat dibuktikan dari Australia yang menolak pernyataan Tiongkok dalam nota pada tanggal 17 April tahun 2020. Dalam nota tersebut, Australia menolak klaim Tiongkok atas kepulauan Paracel dan Spratly. Selain itu, Australia juga menolak argumen Tiongkok dalam mengklaim Laut Cina Selatan melalui dalih "hak historis"<sup>21</sup>. Australia menilai bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok tidak diakui dalam hukum laut internasional. Australia juga menegaskan komitmennya terhadap UNCLOS dan menolak segala bentuk klaim yang tidak berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Dari sisi Indonesia, pandangan terhadap Tiongkok juga serupa. Indonesia berpandangan bahwa klaim yang dilakukan oleh Tiongkok atas dasar banyaknya nelayan-nelayan Tiongkok yang melakukan aktivitas di

---

<sup>21</sup> Rothwell, Donald. "Australia Clarifies Its South China Sea Legal Position in Responding to China." *ANZSIL Perspective*, Australian and New Zealand Society of International Law, 2020, pp. 8–10. ANZSILperspective.com, <https://anzsilperspective.com/australia-clarifies-its-south-china-sea-legal-position-in-responding-to-china/>. Diakses 14 Juli 2025.

Laut Cina Selatan merupakan klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak pernah diakui oleh hukum UNCLOS 1982<sup>22</sup>. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada klaim historis yang dapat mengalahkan ketentuan hukum internasional yang telah disepakati bersama oleh negara-negara di dunia. Bahkan, Indonesia telah beberapa kali mengusir kapal-kapal nelayan Tiongkok yang memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, sebagai bentuk penolakan atas klaim sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) Tiongkok.

Maka dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Australia dan Indonesia memiliki pandangan yang sama terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kesamaan posisi ini menjadi landasan kuat bagi kerja sama keamanan antara kedua negara, termasuk dalam kerangka *Treaty on Defence Cooperation* (TDC) 2024. Australia melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga secara normatif karena berbagi prinsip dan nilai yang sama dalam menolak ekspansi klaim Tiongkok yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Dengan hal tersebut juga yang mendorong Australia untuk melakukan kerja sama TDC terhadap Indonesia untuk dapat menghadapi Tiongkok terutama terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan.

TDC 2024 merupakan bentuk konkret dari pendekatan Australia dalam menghadapi tantangan geopolitik di kawasan. Dalam kerja sama ini, terdapat peningkatan dalam hal pertukaran informasi intelijen, pelatihan militer bersama, dan peningkatan interoperabilitas antara militer kedua negara. Fokus utama dari kerja sama ini adalah memperkuat kemampuan maritim kedua negara dalam menjaga wilayah perairan yang menjadi jalur strategis perdagangan dan militer. Kerja sama ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan merupakan bagian dari upaya nyata untuk menggalang kekuatan kolektif dalam menghadapi tekanan strategis yang ditimbulkan oleh Tiongkok.

---

<sup>22</sup> Reuters. "Indonesia Rejects China's Claims over South China Sea." *Reuters*, 1 Jan. 2020, 5:24 PM UTC (updated 1 Jan. 2020). Reuters, <https://www.reuters.com/article/world/indonesia-rejects-chinas-claims-over-south-china-sea-idUSKBN1Z01QY/>. Diakses 14 Juli 2025.

Kerja sama TDC juga mencerminkan respons Australia terhadap perubahan lanskap strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dengan meningkatnya intensitas persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara di kawasan termasuk Australia merasa perlu untuk menyesuaikan strategi keamanan mereka agar tetap relevan dan mampu menjaga kepentingan nasional. Indonesia menjadi kunci penting karena posisinya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta peran aktifnya dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN yang dapat memperkuat posisi diplomatik dan strategis Australia di kawasan.

Tindakan Australia dalam melakukan kerja sama pertahanan melalui TDC 2024 dengan Indonesia didasari oleh dorongan kuat untuk melindungi *core values*-nya dari ancaman eksternal yang bersifat sistemik, khususnya dari Tiongkok. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Australia tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam merancang kebijakan luar negeri dan strategi pertahanannya agar selaras dengan nilai-nilai inti yang ingin dilindungi. Kerja sama ini dapat dipandang sebagai manifestasi nyata dari prinsip bahwa keamanan nasional dan stabilitas kawasan harus dijaga melalui kemitraan strategis yang berbasis pada kesamaan nilai, kepentingan, dan ancaman bersama.

### ***Middle-range Objective* dalam kerja sama keamanan maritim terhadap Indonesia melalui *Treaty on Defence Cooperation (TDC)* tahun 2024**

*Middle-range objectives* adalah kepentingan yang tidak sekrusial *core values* tetapi tetap penting bagi stabilitas dan kemakmuran negara. Dalam hirarki kepentingan nasional, *middle-range objectives* menempati posisi yang strategis sebagai penghubung antara kepentingan mendasar dengan tindakan konkret dalam kebijakan luar negeri<sup>23</sup>. Kepentingan ini mencakup isu-isu seperti aliansi strategis, kerja sama ekonomi, akses terhadap pasar internasional, pengaruh politik di kawasan, serta kerja sama keamanan regional. Dengan kata lain, *middle-range objectives* bersifat instrumental dan menjadi alat pencapaian bagi tujuan jangka panjang negara. Meskipun tidak menyentuh langsung kelangsungan hidup negara, *middle-range objectives*

---

<sup>23</sup> Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis*. 7th ed., Prentice Hall, 1995.

tetap dianggap krusial karena menyokong sistem politik, ekonomi, dan keamanan nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Tujuan-tujuan ini bersifat strategis dan sering menjadi dasar diplomasi aktif maupun kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam praktiknya, *middle-range objectives* mendorong negara untuk melakukan diplomasi yang bersifat fleksibel, proaktif, dan berorientasi pada penguatan posisi di sistem internasional. Aliansi militer, perjanjian ekonomi, inisiatif perdagangan, dan kerja sama keamanan lintas batas merupakan beberapa bentuk konkret dari implementasi *middle-range objectives*. Negara-negara besar seperti Australia memanfaatkan sasaran ini untuk memperluas jangkauan pengaruh politik dan militer mereka, terutama dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin intensif di kawasan Indo-Pasifik.

Negara akan berupaya mengejar tujuan-tujuan ini selama tidak bertentangan dengan nilai inti. Ini berarti bahwa semua strategi dan kebijakan luar negeri harus selaras dengan *core values* sebagai fondasi utama negara. *Middle-range objectives* berfungsi sebagai penyangga terhadap ancaman tidak langsung, seperti ketegangan regional, perlombaan senjata, penyelundupan lintas batas, serta dominasi kekuatan besar. Strategi kebijakan luar negeri akan dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika eksternal yang terus berubah. *Middle-range objectives* memungkinkan negara untuk membangun ketahanan strategis melalui koalisi dan kerja sama internasional, tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang dipegang teguh.

Dalam konteks kerja sama keamanan maritim, misalnya, *middle-range objectives* dapat mencakup upaya memperkuat pengaruh regional, membangun stabilitas kawasan, dan mengamankan jalur perdagangan internasional. Kawasan Indo-Pasifik merupakan jalur maritim vital yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan menjadi titik strategis bagi arus perdagangan global. Keamanan maritim menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian *middle-range objectives*, khususnya bagi negara-negara seperti Australia yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Ketegangan di Laut Cina Selatan, perompakan laut, dan

kejahatan lintas batas merupakan isu-isu yang menjadi perhatian utama dalam kerja sama keamanan maritim.

Dalam *middle-range objectives*, Australia berupaya meningkatkan kemampuan militernya melalui peningkatan interoperabilitas militer, patroli maritim bersama, latihan gabungan, serta penanggulangan kejahatan lintas batas bersama Indonesia. Upaya ini mencerminkan strategi yang bersifat adaptif, di mana Australia tidak hanya fokus pada penguatan kekuatan militer domestik, tetapi juga membangun kapasitas kolektif bersama mitra regional. Interoperabilitas, sebagai salah satu indikator kesiapan militer, memungkinkan pasukan dari negara berbeda untuk bekerja sama secara efektif dalam operasi gabungan. Hal ini sangat penting dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim, penyelundupan senjata, dan konflik teritorial yang tidak terduga.

Salah satu contoh konkret dari implementasi tujuan ini adalah latihan bersama “*Exercise Keris Woomera*”, yang mempertemukan *Australian Defence Force* (ADF) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menguji kemampuan tempur gabungan di laut, darat, dan udara dengan skenario yang kompleks. Latihan ini tidak hanya melibatkan simulasi taktis, tetapi juga penggunaan teknologi militer mutakhir, pertukaran informasi intelijen, serta pembentukan komando gabungan. Dengan menghadirkan skenario tempur yang multidimensi, *Exercise Keris Woomera* berfungsi sebagai laboratorium strategis untuk menguji kemampuan koordinasi antar unit, kesiapan logistik, dan respons terhadap ancaman mendadak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan *Vice Admiral Justin Garred Jones AO CSC*, RAN, petinggi senior di Royal Australian Navy yang saat ini menjabat sebagai *Chief of Joint Operations* (CJOPS), yang menyatakan bahwa:

“*Exercise Keris Woomera gives the ADF and TNI the opportunity to test our combined capabilities across the sea, land and air employing the most complex scenarios*”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Australian Department of Defence. “*Australia-Indonesia Defence Cooperation Agreement Signed.*” Defence.gov.au, 29 Aug. 2024, <https://www.defence.gov.au/news-events/releases/2024-11-03/australia-indonesia-defence-cooperation-agreement-enables-largest-combined-joint-activity-recent-history>. Daciakses 13 Juli 2025.

*“By training together, our forces build upon shared tactics, techniques, and procedures to enhance interoperability and readiness to respond to shared security challenges in the region”<sup>25</sup>*

*“I would like to thank the sailors, soldiers and aviators deployed on HMAS Adelaide, and ashore in Indonesia. I look forward to observing the exercise alongside my TNI counterparts and friends”<sup>26</sup>*

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kerja sama pertahanan Australia-Indonesia bukan hanya sekadar simbol hubungan bilateral, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai *middle-range objectives* Australia di kawasan Indo-Pasifik. Latihan militer bukan hanya ajang pertukaran militer, tetapi juga mekanisme strategis untuk memperkuat kemitraan dan memperluas pengaruh. Dalam konteks ini, kerja sama dengan Indonesia memperlihatkan bahwa Australia mampu menggalang dukungan regional untuk menghadapi tantangan bersama, termasuk dinamika kekuatan besar seperti Tiongkok.

Melalui latihan gabungan ini, Australia dapat meningkatkan kesiapsiagaan militernya, dan mempererat hubungan dengan Indonesia sebagai mitra kunci dalam keamanan maritim. Latihan ini menjadi sarana pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*) yang penting dalam memperkuat kohesi antar negara regional. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi ajang untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan kedua negara, menyatukan persepsi ancaman, serta menyusun skenario respons yang kompatibel dengan situasi di kawasan Indo-Pasifik. Dengan keterlibatan Indonesia sebagai mitra utama, Australia menegaskan posisinya sebagai aktor keamanan kawasan yang bertanggung jawab dan proaktif.

Dari hal tersebut menggambarkan logika neorealisme dan *middle-range objectives* menurut K.J. Holsti, bahwa negara akan berupaya memaksimalkan keamanan dan pengaruhnya melalui langkah-langkah praktis yang mendukung posisi tawarnya dalam sistem internasional yang anarki. Teori neorealisme berangkat dari asumsi bahwa dunia internasional tidak memiliki otoritas tertinggi, sehingga negara harus memprioritaskan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

keamanan melalui penguatan kapasitas nasional dan aliansi strategis. Dalam logika ini, negara tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme multilateral tanpa meningkatkan kemampuannya sendiri. Kerja sama seperti TDC dan latihan seperti Keris Woomera adalah upaya realistis untuk meningkatkan kapasitas pertahanan kolektif yang dapat menanggapi dinamika ancaman secara efektif.

Menurut neorealisme, tidak ada otoritas tertinggi yang menjamin keamanan negara, sehingga setiap negara harus mengandalkan kemampuan sendiri maupun membangun aliansi strategis. Dalam situasi seperti ini, kerja sama bilateral menjadi sarana untuk memperluas ruang gerak strategis dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar lain yang mungkin memiliki kepentingan berbeda. Dengan membangun kemitraan militer dengan Indonesia, Australia menciptakan zona pengaruh yang saling menguntungkan dan memperkuat kapasitas regional untuk menjaga stabilitas. Hal ini juga sejalan dengan visi Australia untuk menciptakan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan (*rules-based order*), yang menjadi prioritas kebijakan luar negeri Australia dalam satu dekade terakhir.

*Middle-range objectives*, dalam konteks ini, menjadi jembatan antara kepentingan dasar (*core values*) dan instrumen kebijakan luar negeri, agar stabilitas internal dan eksternal dapat terjaga secara simultan. Konsep ini memungkinkan negara untuk menjaga kesinambungan strategi nasional dengan cara yang lebih fleksibel namun tetap rasional. Dalam praktiknya, pencapaian *middle-range objectives* mendukung keberlangsungan *core values*, karena stabilitas regional dan hubungan diplomatik yang sehat adalah fondasi untuk menjaga keamanan nasional. Oleh sebab itu, kerja sama militer seperti dengan Indonesia bukan hanya kebijakan temporer, tetapi merupakan bagian dari *grand strategy* Australia untuk mempertahankan status dan pengaruhnya di kawasan.

Peneliti melihat bahwa keterlibatan Australia dalam latihan bersama ini tidak hanya memperlihatkan upaya penguatan kapabilitas militer, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan interoperabilitas dengan Indonesia sebagai mitra strategis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jalur perdagangan tetap aman, stabilitas kawasan terjaga, serta potensi konflik

dapat dicegah melalui kerja sama multilateral yang terencana. Dengan menggabungkan keunggulan geografis Indonesia dan kapabilitas militer Australia, kerja sama ini menciptakan sinergi strategis yang dapat menangkal pengaruh dan manuver kekuatan besar seperti Tiongkok. Keberhasilan kerja sama ini juga dapat dijadikan model bagi negara lain di kawasan dalam membangun kemitraan pertahanan regional yang efektif dan berkelanjutan.

Hal ini menegaskan bahwa Australia secara konsisten mengupayakan *middle-range objectives* sebagai bagian dari strategi pertahanannya. Strategi ini dilakukan secara bertahap melalui peningkatan latihan militer, pembangunan infrastruktur pertahanan bersama, serta koordinasi kebijakan keamanan maritim. Australia menyadari bahwa tantangan kawasan tidak dapat diatasi secara unilateral, sehingga kolaborasi menjadi syarat mutlak dalam membentuk stabilitas jangka panjang. Melalui kerja sama ini, Australia juga memperluas pengaruh politiknya di Asia Tenggara dan memperkuat legitimasinya sebagai kekuatan regional.

Dengan menjalin kerja sama pertahanan, meningkatkan interoperabilitas, dan berkontribusi pada stabilitas regional, secara tidak langsung Australia juga melindungi *core values*-nya. *Middle-range objectives*, meskipun bersifat menengah, memiliki efek berantai terhadap pencapaian tujuan utama negara. Melalui strategi jangka menengah ini, Australia dapat membangun jaringan kemitraan yang mendukung kepentingan strategis dan mempertahankan statusnya dalam sistem internasional yang dinamis.

*Middle-range objectives* menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan luar negeri Australia yang adaptif namun tetap berlandaskan kepentingan nasional yang mendasar. Kerja sama strategis dengan Indonesia dalam bidang pertahanan bukan hanya respons terhadap ancaman langsung, tetapi juga upaya sistematis untuk memperkuat posisi Australia dalam lanskap geopolitik Indo-Pasifik. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa *middle-range objectives* tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga menjadi pilar kebijakan luar negeri yang mengarahkan negara menuju keamanan, kemakmuran, dan kestabilan yang berkelanjutan.

## ***Long-range Goals* dalam kerja sama keamanan maritim terhadap Indonesia melalui *Treaty on Defence Cooperation (TDC)* tahun 2024**

*Long-range goals* lebih bersifat idealistik dan berorientasi pada masa depan. Kepentingan ini meliputi visi atau cita-cita besar suatu negara dalam tatanan internasional, seperti penyebaran nilai-nilai demokrasi, keadilan global, atau reformasi sistem internasional. Kepentingan jenis ini biasanya mencerminkan aspirasi jangka panjang yang tidak mendesak secara langsung, namun tetap memiliki pengaruh besar terhadap arah dan kerangka berpikir kebijakan luar negeri suatu negara. Negara yang memiliki *long-range goals* cenderung memiliki pandangan strategis dan komprehensif tentang perannya di dunia, serta menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai domestik dengan proyek internasional yang didukung atau dipromosikannya. Dalam praktiknya, *long-range goals* akan memberikan dasar normatif dan ideologis atas sikap suatu negara terhadap isu global dan regional<sup>27</sup>.

Meskipun tidak mendesak secara langsung, *long-range goals* tetap mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri dalam jangka panjang dan biasanya dipengaruhi oleh ideologi, sejarah, dan aspirasi nasional. Dalam hal ini, latar belakang sejarah kolonial, pengalaman geopolitik, serta sistem politik suatu negara memainkan peran penting dalam membentuk arah cita-cita jangka panjangnya. Negara-negara dengan sistem demokrasi liberal, misalnya, umumnya memasukkan penyebaran demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan tatanan berbasis hukum internasional sebagai bagian dari visi jangka panjang mereka. Tujuan tersebut mencerminkan identitas dan nilai-nilai domestik yang diharapkan dapat terefleksikan dalam lingkungan internasional. *Long-range goals* tidak hanya bersifat idealistik, tetapi juga menjadi alat legitimasi internasional atas kebijakan luar negeri yang dijalankan negara tersebut.

*Long-range goals* berfungsi sebagai arah kebijakan yang lebih luas dan dapat membentuk persepsi strategis negara terhadap peranannya di dunia. Visi jangka panjang ini akan menjadi acuan dalam merancang strategi kebijakan luar negeri yang tidak hanya fokus pada kepentingan jangka

---

<sup>27</sup> Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis*. 7th ed., Prentice Hall, 1995.

pendek seperti perlindungan warga negara atau pengamanan perdagangan, tetapi juga upaya membentuk lingkungan eksternal yang sesuai dengan nilai-nilai nasional. Dengan memiliki *long-range goals*, negara menciptakan narasi besar yang memperkuat posisi diplomatiknya serta membangun koherensi antara tindakan luar negeri dengan citra nasional yang ingin dibentuk di mata dunia. Dalam banyak kasus, tujuan jangka panjang ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen strategis negara seperti *white paper*, dokumen pertahanan, atau strategi kawasan.

Holsti menyatakan bahwa tujuan jangka panjang kerap menjadi dasar pembangunan identitas internasional suatu negara, misalnya sebagai pemimpin regional atau penjaga perdamaian global. Dengan kata lain, *long-range goals* berfungsi sebagai pembentuk identitas negara di dunia internasional, dan bukan sekadar instrumen politik luar negeri pragmatis. Negara seperti Australia, misalnya, memanfaatkan visi jangka panjangnya untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang memainkan peran aktif dalam stabilisasi kawasan, mediasi konflik, dan promosi nilai-nilai internasional seperti demokrasi dan supremasi hukum. Visi ini tidak hanya memberikan arah kebijakan luar negeri, tetapi juga menanamkan kepercayaan di kalangan mitra strategis bahwa negara tersebut berkomitmen pada prinsip-prinsip universal yang stabil dan dapat diprediksi.

Australia berupaya membangun Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera. Tujuan tersebut tercermin dalam *Foreign Policy White Paper 2017*. Dalam *White Paper* tersebut, khususnya pada *Chapter Three: A Stable and Prosperous Indo-Pacific*, ditegaskan bahwa:

*“No long-term foreign policy objective is more important to Australia than ensuring our region evolves peacefully and without an erosion of the fundamental principles on which the Indo-Pacific’s prosperity and cooperative relations are based”*<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Australian Department of Foreign Affairs and Trade. *Foreign Policy White Paper: Chapter Three - A Stable and Prosperous Indo-Pacific*. Australian Government, 2017. Diakses 13 Juli 2025, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/chapter-three-stable-and-prosperous-indo-pacific.html>

*“Australia will be active in advancing and protecting our interests at this critical time. Our interests lie both in stability and in the character of the enduring peace we seek. In particular, our security and prosperity will be enhanced in a region characterised by respect for international law and other norms, and by open markets. This will help ensure Australia can prosecute our national interests unconstrained by the exercise of coercive power. Our policies to support a stable and prosperous Indo-Pacific complement our trade, investment and economic engagement with the region”<sup>29</sup>.*

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Australia tidak hanya fokus pada kepentingan praktis jangka pendek atau menengah, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk membentuk lingkungan regional yang mendukung prinsip-prinsip hukum internasional, keterbukaan pasar, dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan koersif. Dengan menjunjung prinsip-prinsip tersebut, Australia berharap kawasan Indo-Pasifik berkembang dalam suasana yang kondusif bagi perdamaian jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama multilateral. Pendekatan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengurangi pengaruh kekuatan besar yang mencoba membentuk kawasan berdasarkan kekuatan militer atau tekanan ekonomi.

Dengan kata lain, Australia berupaya membangun tatanan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, terbuka, dan berkeadilan sebagai prasyarat bagi keamanan dan kemakmuran nasionalnya di masa depan. Ini berarti bahwa keamanan nasional Australia tidak hanya diukur dari seberapa kuat militernya atau seberapa besar aliansinya, tetapi juga dari seberapa stabil lingkungan eksternal yang menopang eksistensinya. Sebuah kawasan yang dihormati dan dikelola berdasarkan aturan internasional akan lebih mendukung kelangsungan dan kedaulatan Australia dalam jangka panjang. Upaya Australia untuk membentuk Indo-Pasifik yang sesuai dengan visi idealnya merupakan bagian dari strategi protektif dan progresif terhadap kepentingan nasional.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Dari hal tersebut menggambarkan logika neorealisme dan *long-range goals* menurut K.J. Holsti bahwa meskipun realitas sistem internasional bersifat anarkis dan kompetitif, negara tetap memiliki aspirasi idealistik untuk membangun lingkungan eksternal yang sesuai dengan nilai dan prinsipnya. Dalam pendekatan neorealisme, sistem internasional yang anarki memaksa negara untuk memprioritaskan keamanan dan kekuatan sebagai instrumen utama kelangsungan hidup. Namun, Holsti melihat bahwa negara tetap mampu menyisipkan aspirasi ideal dalam formulasi kebijakan luar negeri. Bahkan dalam kondisi anarki, negara masih berupaya menata sistem internasional sedemikian rupa agar mendukung eksistensi dan stabilitas internalnya. *Long-range goals* tidak bertentangan dengan neorealisme, tetapi menjadi pelengkap rasional dari tindakan negara dalam menciptakan lingkungan yang lebih dapat dikendalikan.

Logika neorealisme menjelaskan bahwa di balik dorongan idealistik tersebut, tetap ada kepentingan rasional untuk menciptakan lingkungan regional yang stabil berarti meminimalisir risiko konflik dan meningkatkan ruang manuver diplomasi, ekonomi, dan keamanan. Negara seperti Australia, dengan posisi geografis dan ekonomi yang rentan terhadap perubahan global, memerlukan tatanan regional yang dapat diprediksi dan mendukung kepentingan nasionalnya. Stabilitas kawasan bukan hanya ideal moral, tetapi juga kebutuhan strategis agar negara tidak terjebak dalam konflik yang merugikan. Dalam konteks ini, *long-range goals* memberikan kerangka normatif sekaligus fungsional bagi kebijakan luar negeri negara dalam mengantisipasi dinamika global.

Dalam hal ini, *long-range goals* menjadi pondasi visi strategis yang memberi arah bagi kebijakan praktis di level *middle-range objectives* maupun perlindungan *core values*. Ketiga tingkatan kepentingan ini saling melengkapi dan membentuk kerangka kebijakan luar negeri yang komprehensif. *Core values* menjaga eksistensi negara, *middle-range objectives* memastikan stabilitas dan pengaruh jangka menengah, sementara *long-range goals* memberikan tujuan dan arah jangka panjang agar negara tidak kehilangan orientasi dalam perubahan dunia yang cepat. Dengan pondasi ini, kebijakan

luar negeri Australia dapat bersifat konsisten, adaptif, dan strategis sekaligus.

Peneliti melihat bahwa melalui kebijakan *White Paper* 2017, Australia menunjukkan konsistensi antara cita-cita idealistik dan kepentingan praktisnya. Dalam setiap kebijakan, mulai dari kerja sama keamanan maritim, diplomasi kawasan, hingga kebijakan investasi luar negeri, nilai-nilai jangka panjang seperti stabilitas, keterbukaan, dan supremasi hukum selalu menjadi benang merah. Hal ini mencerminkan bahwa Australia tidak hanya menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai retorika diplomatik, tetapi sebagai prinsip operasional yang memandu keputusan strategisnya. *Long-range goals* Australia bukan hanya simbol dari idealisme, tetapi juga bagian integral dari perencanaan keamanan nasional, ekonomi, dan hubungan internasionalnya.

Upaya mempromosikan kawasan yang damai dan terbuka juga menjadi strategi untuk menghalau dominasi aktor besar yang berpotensi mengganggu tatanan berbasis hukum di Indo-Pasifik. Dalam praktiknya, Australia sering mengkritik penggunaan kekuatan koersif oleh negara-negara besar seperti Tiongkok yang berusaha mengubah *status quo* kawasan melalui tekanan ekonomi maupun militer. Dukungan Australia terhadap tatanan berbasis aturan bukan semata demi stabilitas regional, tetapi juga untuk melindungi kedaulatan nasional dari pengaruh koersif eksternal. Ini menjadikan *long-range goals* sebagai bagian dari strategi defensif dan ofensif Australia dalam menghadapi tantangan kawasan.

*Long-range goals* Australia tidak sekedar retorika, melainkan terintegrasi dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, perdagangan, dan kerja sama regional. Pendekatan ini mencerminkan betapa pentingnya peran visi strategis dalam menjaga kesinambungan dan relevansi kebijakan nasional dalam sistem internasional yang dinamis. Australia memosisikan dirinya sebagai aktor kawasan yang visioner, pragmatis, dan berprinsip ciri khas negara *middle power* yang ingin berperan aktif namun tidak hegemonik.

Hal ini menegaskan bahwa visi jangka panjang berfungsi sebagai arah dan acuan bagi seluruh instrumen kebijakan luar negeri Australia. Setiap kebijakan, mulai dari kerja sama pertahanan dengan negara-negara ASEAN,

penolakan terhadap klaim sepihak di Laut Cina Selatan, hingga keterlibatan dalam forum multilateral seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS), dilandasi oleh orientasi strategis yang berakar dari *long-range goals* tersebut. Visi ini menjadi semacam "kompas moral dan strategis" yang memastikan bahwa tindakan Australia tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional jangka panjang yang berkeadilan dan inklusif.

Membangun kawasan Indo-Pasifik yang stabil, sejahtera, dan terbuka merupakan investasi strategis untuk memastikan kepentingan nasional Australia tetap terlindungi dari ancaman koersif di masa depan. Stabilitas ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kerja sama lintas batas, dan penguatan institusi regional yang adil dan transparan. Perwujudan *long-range goals* bukan hanya proyek politik, tetapi juga bagian dari pembangunan sistem internasional yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dengan landasan ini, Australia berupaya mengukuhkan identitasnya sebagai negara *middle power* yang berperan aktif menjaga tatanan kawasan yang berbasis aturan dan mendukung kerja sama internasional yang adil. Identitas ini memperkuat legitimasi Australia dalam diplomasi regional maupun global, serta membuka ruang bagi keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat internasional.

### **3. KESIMPULAN**

Alasan dibalik kerja sama *Treaty on Defence Cooperation* (TDC) Australia terhadap Indonesia pada tahun 2024 dikarenakan adanya pengaruh dari kepentingan secara *core values*, *middle-range objectives*, dan *long-range goals*. Kepentingan secara *core values* Australia adalah untuk dapat menghadapi ancaman keamanan dari Tiongkok. Kepentingan secara *middle-range objectives* Australia adalah untuk meningkatkan kemampuan militer Australia melalui interoperabilitas militer, patroli maritim bersama, latihan gabungan, serta penanggulangan kejahatan lintas batas bersama Indonesia. Kepentingan secara *long-range goals* Australia adalah untuk membangun Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera. Tujuan tersebut berdasarkan *White Paper* 2017.

Namun kepentingan yang paling berpengaruh bagi Australia dalam melakukan kerja sama *Treaty on Defence Cooperation* 2024 adalah, *core*

*values*. Hal ini terlihat pada tindakan Australia yang merasa terancam oleh agresivitas Tiongkok, seperti insiden pencegatan pesawat RAAF P-8 oleh jet tempur J-16 Tiongkok pada 26 Mei 2022 dan pernyataan Richard Marles pada 19 April 2024. Sebagai respon, Australia memperkuat kerja sama pertahanan melalui *Treaty on Defence Cooperation 2024* dengan Indonesia karena memiliki pandangan sama dalam menolak klaim sepihak Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang juga ditegaskan dengan penolakan Australia terhadap klaim “hak historis” Tiongkok serta komitmennya pada UNCLOS. Perlindungan *core values* menjadi dasar utama bagi Australia dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan kerja sama strategisnya di kawasan.

### **3. REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing, 2012.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed., SAGE Publications, 2014.

Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Institute of Southeast Asian Studies, 2010.

#### **ARTIKEL JURNAL**

Abbas, Syed Ali, Amna Saqib, dan Maryyum Masood. “US Military Posture in the Asia-Pacific and Its Impact on Regional Stability.” *BTTN Journal*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 66–88. <https://doi.org/10.61732/bj.v3i1.88>

Adirini Pujayanti. “Isu Kesejahteraan Hewan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia.” *Jurnal Hubungan Internasional*, 2016. Diakses 9 Juli 2025.

Aria Sandy, Muhamad Rizal, et al. “The Impact of Cyber Espionage Issue on Maritime Security Cooperation Between Indonesian National Police and

Australian Federal Police.” *IJHES*, vol. 3, no. 2, Okt. 2023, pp. 866–874. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/866>

### **Website**

“The Lombok Treaty, 2006.” *70 Years Indonesia–Australia*. <https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/cooperation-between-australia-and-indonesia/the-lombok-treaty-2006>. Diakses 11 Juli 2025.

Asia Society Australia. “Factsheet: Australia–Indonesia Relationship.” <https://asiasociety.org/australia/factsheet-australia-indonesia-relationship>. Diakses 9 Juli 2025.

Australian Bureau of Statistics. *Year Book Australia, 2009–10*. ABS Catalogue No. 1301.0, Canberra, 4 Juni 2010. Web. Diakses 7 Juli 2025.